KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INFINITY

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) AMBON

BPPP Ambon BP3 Ambon

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa #2023 HKP THRIVE

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja Tahun 2023 ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada Tahun 2023. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Selama Tahun 2023, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang terdiri dari 7 sasaran kegiatan dan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada Tahun 2023, keberhasilan/kegagalan program, permasalahan dan solusi serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi selama tahun 2023 dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja kedepan secara produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, koordinasi pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.

Ambon, 17 Januari 2024

Kepala Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan Ambon

Abubakar

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Abubakar S.St.Pi, M.Si

Ketua:

Rahmawati Umasugi S.Pi, M.Si

Sekertaris :

Moh. Arief Hidayat A.Md, S.Pi

Anggota:

Fiona A.B. Nikyuluw S.Pi, M.Si

Wahyu Retno Aris S.St.Pi

Dessy Rompis S.AP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
TIM PENYUSUN ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
IKTISAR EKSEKUTIF ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 6
1.3 Tugas dan Fungsi BPPP Ambon 6
1.4 Keragaan SDM BPPP Ambon 9
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA **12**
2.1 Rencana Strategis 12
2.2 Rencana Kerja Tahun 2023 23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 24
2.4 Pengukuran Kinerja 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **29**
3.1 Prestasi Kinerja 29
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja 30
3.3 Akuntabilitas Keuangan 98
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPP Ambon 100

BAB IV PENUTUP **106**
4.1 Capaian Kinerja Utama 106
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi 108
LAMPIRAN

IKTISAR EKSEKUTIF

Sasaran kinerja yang dicapai pada tahun 2023 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yaitu administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan kerjasama, informasi dan dokumentasi ilmiah yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah menetapkan 7 (Tujuh) Sasaran Strategis yang akan dicapai pada Tahun 2023. Dari 7 (Tujuh) Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 25 (Dua puluh lima) indikator kinerja, yang selanjutnya ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan target kinerja Balai yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2023.

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key perfomance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil

pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Ambon di tingkat korporat tahun 2023 sebesar 104,84%.

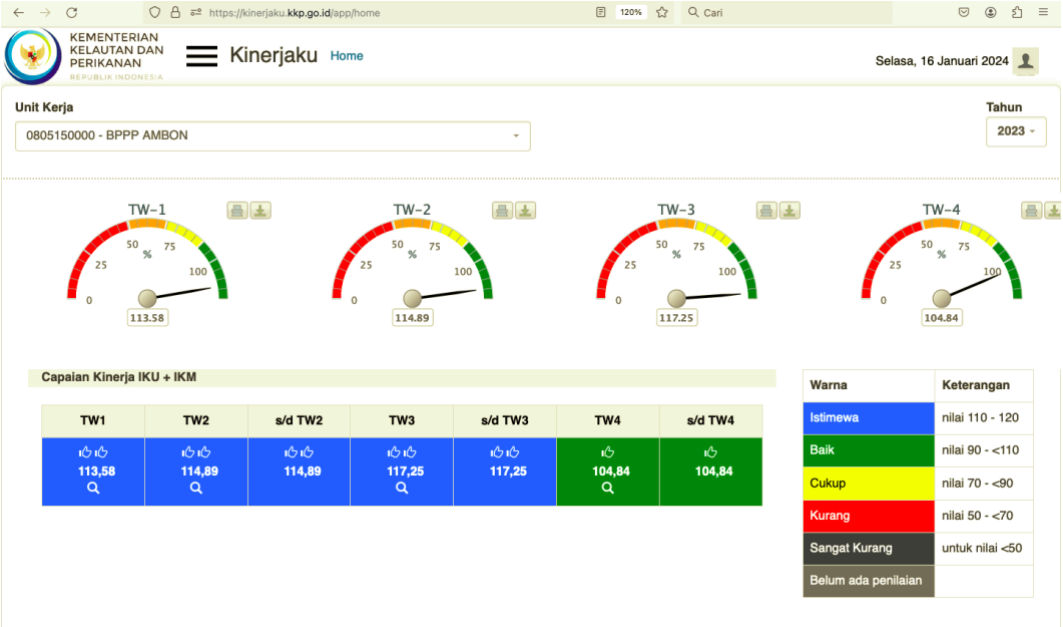

Dashboard Kinerja BPPP Ambon

Selama tahun 2023, dari 25 IKU yang menjadi target tahun 2023 BPPP Ambon, ada 1 IKU yang belum memenuhi target dan 24 IKU sisanya semua telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja BPPP Ambon Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Realisasi
Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	70	72,3	103,29
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	3.414	3.560	104,28
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,570	0,71	120
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	90	90	100
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	16	16	100
		6	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket)	2	2	100
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	2.750	3.015	109,64
		8	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	83	88	106,02
		9	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	190	200	105,26
		10	Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)	348	394	113,22
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	11	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Desa Perikanan Cerdas)	1	1	100
		12	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (Kelompok)	1	5	120
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	13	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1	1	100
		14	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1	1	100
Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM						
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan	15	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100	100	100

	Manajemen BPPP Ambon	16	Unit Kerja BPPP Ambon yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1	1	100
		17	Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	93	96,61	103,88
		18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%)	92	116,58	120
		19	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	77	85,87	111,52
		20	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5	0	120
		21	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	80	100	120
		22	Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja BPPP Ambon (Inovasi)	1	1	100
		23	Nilai PM SAKIP Lingkup BPPP Ambon (Nilai)	75	82,45	109,93
		24	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)	93,75	92,28	98,43
		25	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	82	82,42	100,51

Keterangan : Nilai capaian maksimal 120%

Secara umum kinerja BPPP Ambon sangat baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap IKU dengan Target Kinerja Tahunan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BPPP Ambon. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja

BPPP Ambon. Akhirnya, BPPP Ambon berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Visi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu "Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional". RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target

pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/ MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human–centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber–physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network* / komunikasi, sedangkan society 5.0 merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber–physical–human systems*. Pada era *society* 5.0 manusia tidak hanya dijadikan obyek (*passive element*), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama *physical system* dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia diperlukan untuk menjaga kesimbangan maupun keharmonisan.

Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku pelaku utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses alih informasi dan teknologi (*transfer knowledge*) bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya. Terlebih lagi,

pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Y Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pusat, sehingga BPPSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sebagai unit satuan kerja harus mampu memainkan peran strategisnya agar penyelenggaraan penyuluhan perikanan dapat berjalan efektif, efisien dan kompeten.

Keberadaan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP melalui:

a. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;
b. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
c. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
d. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan KP tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas

dan sasarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri dengan Eselon I dan diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai, dan telah ditetapkan sampai tingkat daerah (satuan kerja).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada tahun 2023 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PUSLATLUH KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah KKP khususnya program pelatihan dan penyuluhan KP sebagaimana tertuang dalam Renstra PUSLATLUH KP tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi objektif atau profil Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada tahun 2023, perencanaan stategis, target dan capaian kinerja serta evaluasi capaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan/atau Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

1.2 Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon Tahun 2023 memenuhi beberapa tujuan, yaitu:

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala PUSLATLUH KP selaku Pemberi Mandat atas pencapaian Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon selama Tahun 2023.

b. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

1.3 Tugas dan Fungsi BPPP Ambon

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan dan penyuluhan yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPP Ambon dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;

b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;

c. Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan;

d. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;

e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan;

f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;

g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

h. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta; dan

i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, BPPP Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia. Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan uraian tugas tersendiri. Sub Bagian Umum dengan tugasnya melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan. Kelompok jabatan fungsional dengan tugasnya memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud, ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan funsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/KEPMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, Struktur Organisasi di BPPP Ambon dapat dilihat pada Gambar:

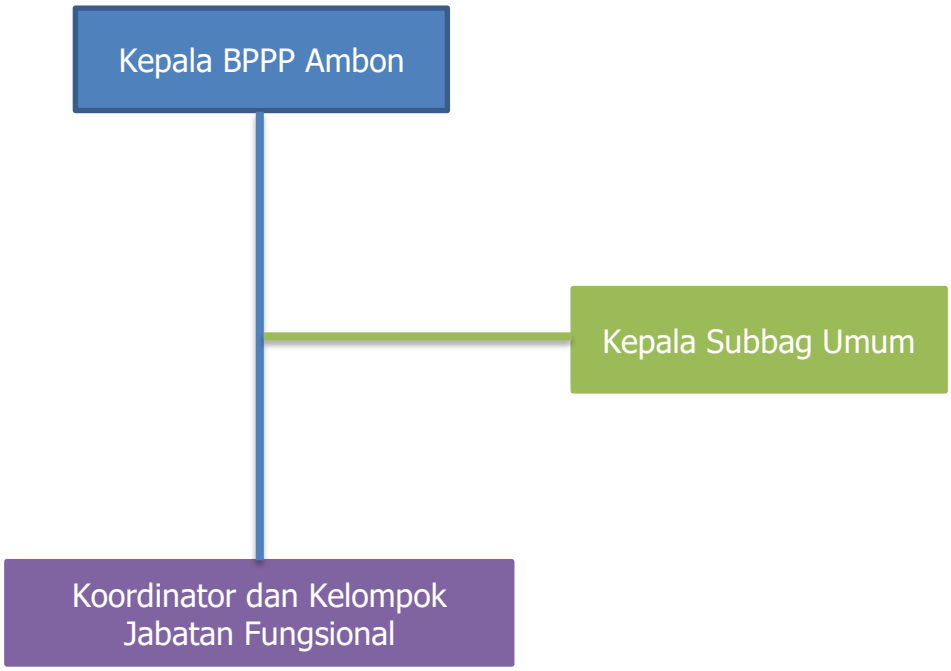

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Ambon

1.4 Keragaan SDM BPPP Ambon

Jumlah pegawai di BPPP Ambon per 31 Desember 2023 sebanyak 408 orang dengan rincian komposisi pegawai sebagai berikut :

Tabel 1. Komposisi Pegawai BPPP Ambon

NO	BAGIAN	JUMLAH
1	**Kepala Balai / Eselon III**	1 Orang
2	**Subbag Umum**	1 Orang (Plt)
	Jabatan Fungsional Umum	21 Orang
	Tenaga Kontrak	15 Orang
3	Jabatan Fungsional Tertentu	
	- Widyaiswara	4 Orang
	- Instruktur	14 Orang
	- Penyuluh	244 Orang
	- CPNS	1 Orang
4	Jabatan Fungsional Lainnya	
	- Analis Perencana	1 Orang
	- Analis Kepegawaian	1 Orang
	- Pranata Keuangan APBN Mahir	1 Orang
	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	12 orang
5	Penyuluh Perikanan Bantu	92 Orang
	Jumlah Total	**408 Orang**

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon Tahun 2023:

a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

b. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

c. PP Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara lebih rinci, muatan dokumen LKj ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

a. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan isi laporan kinerja;

b. Bab I – Pendahuluan, Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

c. Bab II – Perencanaan Kinerja, Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

d. Bab III –Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi, Menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

e. Bab IV – Penutup, Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

f. Lampiran, Perjanjian kinerja,

Lampiran yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberikan arah bagi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini dituangkan dalam perencanaan strategis periode lima tahunan. Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis baik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun maupun 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam dokumen perencanaan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan. Rencana kerja juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 berisi langkah-langkah strategis yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dalam rangka menunjang visi

Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dan untuk mencapai visi yang tertuang dalam RENSTRA, maka BPPP Ambon telah menetapkan Visi, Misi, Tugas dan Fungsi yaitu :

2.1.1 Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan menggunakan visi Presiden.

Visi BPPSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan visi BPPSDM yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Sejalan dengan Pusat pelatihan dan Penyuluhan KP, visi BPPP Ambon pada tahun 2020-2024 adalah menggunakan Visi BPPSDM, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

2.1.2 Misi

Untuk dapat berkontribusi dalam pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka BPPP Ambon menerapkan misi yang sama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menjalankan misi Presiden, KKP dan BPPSDM dalam bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1) Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan;
2) Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3) Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang lestari;
4) Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab

berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

2.1.3 Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
2) Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
3) Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
4) Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.4 Sasaran Program

Renstra BPPP Ambon tahun 2020 – 2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program pelatihan dan penyuluhan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BPPP Ambon sebagai suatu *outcome/impact* dari

program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam dua kegiatan, yaitu Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan serta Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM.

1) Terlaksananya pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP.

   Mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera melalui pendampingan kelompok oleh penyuluh perikanan adalah tujuan yang ingin dicapai BPPP Ambon pada masa kerja 5 tahun mendatang. Keberhasilan pencapaian tujuan ini ditandai dengan indikator kinerja sebagai berikut :

   a) Tersuluhnya kelompok pelaku utama/usaha sebanyak 14.137 kelompok selama 2020-2024;
   b) Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya sebanyak 319 kelompok selama 2020- 2024;
   c) Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan sebanyak 485 kelompok selama 2020-2024.

2) Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan.

   Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan teknologi hasil inovasi riset kelautan dan perikanan. Indikator yang ditargetkan adalah

adanya desa mitra yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil riset dan inovasi BPPSDM sebayak 1 desa setiap tahun selama 2020-2024;

3) Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat.

Meningkatnya kompetensi SDM KP adalah tujuan utama pelatihan dan penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh BPPP Ambon. Untuk mengetahui pencapaian tujuan itu, indikator yang digunakan selama 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

a) Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri sebanyak 60%.
b) Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) sebanyak 76 orang.
c) SDM KP yang dilatih sebanyak 8.765 orang.
d) Masyarakat KP yang bersertifikat kompetensi sebanyak 1.300 orang.
e) Percontohan penyuluhan KP yang diterapkan sebanyak 27 unit.
f) Sarana dan prasarana BPPP Ambon yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 4 unit.
g) Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga diklat sebanyak 5 lembaga.
h) Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina di BPPP Ambon (unit) sebanyak 2.720 unit.

4) Tatakelola pemerintahan yang baik

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ingin menjadi instansi yang memiliki kinerja yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Untuk itu, tujuan ini adalah mutlak untuk menyempurnakan kekurangan yang dimiliki dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

a) Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPP Ambon sebesar 72.
b) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon sebesar 82%.
c) Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon adalah 88 atau baik.
d) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK tahun lalu dibandingkan realisasi anggaran TA. lalu sebesar $\leq$1 %.
e) Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon sebesar minimal 86.

2.1.5 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta riset kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon bertugas melaksanakan kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan pada wilayah kerjanya di 9 (sembilan) Provinsi di Indonesia. Wilayah kerja BPPP Ambon yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Gambar 2. Wilayah Kerja BPPP Ambon

BPPP Ambon juga membawahi Penyuluh Perikanan pada 8 (delapan) Provinsi meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. BPPP

Ambon bertugas menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan dan pelaksanaan penyuluhan, serta penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

Gambar 3. Wilayah Satminkal Penyuluhan BPPP Ambon

Keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut adalah potensi sumberdaya BPPP Ambon dalam mencapai tujuan organisasi :

1) BPPP Ambon berada pada posisi yang sangat strategis di Kota Ambon, tepatnya di Jl. Martha Alfons, Poka, Kecamatan Teluk Ambon. Sebelah selatan berbatasan dengan Pantai Teluk Ambon, sebelah Utara

berbatasan dengan Universitas Pattimura, sebalah barat dicapai dengan jalur darat melalui Wayame dan Rumah Tiga, Sebelah Timur dicapai dengan kapal feri penyebarangan Galala-Poka

2) Memiliki *workshop* yang lengkap untuk setiap bidang pelatihan;
3) BPPP Ambon memiliki instalasi budidaya ikan air tawar yang strategis untuk pengembangan budidaya ikan air tawar;
4) Memiliki SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya (4 orang widyaiswara, 14 orang instruktur, 3 orang tenaga teknis/pelatih, 250 orang penyuluh perikanan PNS dan 6 orang PPPK Penyuluh Perikanan serta 109 orang penyuluh perikanan bantu);
5) Sebagian besar SDM BPPP Ambon memiliki usia muda yang produktif;
6) BPPP Ambon tersertifkasi ISO 9001:2015;
7) Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu ;
8) Memiliki akreditasi dari Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk menyelenggarakan diklat *Basic Safety Training* (BST);
9) Memiliki akreditasi program pelatihan budidaya ikan hias nemo dari Lembaga Akreditasi (LA) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
10) Adanya mandat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan kepada BPPP Ambon sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK);
11) BPPP Ambon sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi 1 sehingga dapat

menerbitkan sertifikat kompetensi sendiri;

12) SDM Asesor BPPP Ambon sebanyak 39 orang sehingga akan mampu melaksanakan uji kompetensi dengan jumlah peserta yang banyak;
13) BPPP Ambon mampu membuat sarana produksi perikanan tertentu;
14) BPPP Ambon mampu menghasilkan produk hasil perikanan yang layak dipasarkan.

b. Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Ambon memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain :

Aspek penyelenggaraan pelatihan KP :

1) Ketersediaan tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa sudah memasuki usia purnatugas dan mutasi;
2) Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
3) Kurikulum dan modul belum seluruhnya tersedia dan terstandarisasi.
4) Kurangnya program pengembangan SDM pelatih.

Sedangkan aspek penyelenggaraan penyuluhan :

1) Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
2) Kualitas dan kuantitas penyebaran penyuluh perikanan masih belum memadai;
3) Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
4) Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
5) Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
6) Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;
7) Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaran penyuluhan pasca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pada Rencana Strategis, BPPP Ambon didukung dengan anggaran sebesar Rp 64.088.392.000. Dukungan anggaran tersebut berupa kegiatan :

Tabel 2. Dukungan anggaran BPPP Ambon

No	KEGIATAN/RO	TARGET
1	ABW.002 Kaji Terap	120.000.000
2	DCC.001 Sertifikasi Kompetensi	54.000.000
3	QDD.001 Kelompok Pelaku Utama	6.090.040.000
4	QDD.002 Percontohan	929.250.000
5	RAL.001 Sarana	1.448.784.000
6	RBQ. 001 Prasarana	200.000.000
7	SCC.001 Pelatihan KP yang dilatih	3.252.679.000

8	Dukman	460.311.000
9	Gaji dan Tunjangan	42.004.580.000
10	Operasional	9.528.748.000
	TOTAL	**64.088.392.000**

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PANRB Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang diimplementasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah memiliki tujuan :

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelesaikan manajemen kinerja secara baik,
b. Untuk mengontrol serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan kinerja didalam laporan kinerja ini sudah didasarkan pada analisis *logical framework*. Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2023 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada Januari 2023. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023.

Sampai pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon telah mengalami perubahan Perjanjian Kinerja BPPP Ambon sebanyak 2 kali, yaitu :

1. Pada tanggal 21 Juni 2023, dikarenakan terjadinya penambahan pagu anggaran yang berasal dari pemanfaatan dana PNBP kegiatan pelatihan dan penyuluhan sehingga menyebabkan penambahan pagu anggaran dari pagu awal sebesar Rp. 59.317.215.000 menjadi Rp. 63.133.607.000 dan target Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon dari target awal sebanyak 2.820 orang menjadi 3.204 orang.
2. Pada tanggal 04 Desember 2023, dikareanakan terjadinya penambahan pagu anggaran mendukung program prioritas KKP pada Kampung Nelayan Modern (KALAMO) di Desa Samber Binyeri Biak Numfor sehingga menyebabkan penambahan penambahan pagu anggaran dari pagu awal sebesar Rp. 63.133.607.000 menjadi Rp. 64.088.392.000 dan target masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang Dilatih di BPPP Ambon dari target awal sebanyak 3.204 orang menjadi 3.414 orang dan penambahan IKU baru yaitu Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (Kelompok).

Adapun perubahan Indikator Kinerja Utama bulan Desember tahun 2023, sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	70
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	3.414
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,570
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	90
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	16
		6	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket)	2
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	2.750
		8	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	83
		9	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	190
		10	Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)	348
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	11	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Desa Perikanan Cerdas)	1
		12	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (Kemlompok)	1
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	13	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1
		14	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1
Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPP Ambon				
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	15	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		16	Unit Kerja BPPP Ambon yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		17	Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	93
		18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%)	92
		19	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	77
		20	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA 2022 (%)	≤ 0,5
		21	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	80
		22	Unit kerja Unit Kerja BPPP Ambon yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)	1
		23	Nilai PM SAKIP Lingkup BPPP Ambon (Nilai)	75.0
		24	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)	93,75
		25	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	82

2.4 Pengukuran Kinerja

2.4.1 Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize, minimize,* dan *stabilize.* Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

a. Angka maksimum adalah 120;
b. Angka minimum adalah 0;
c. Formulasi penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda.

Adapun status indeks capaian IKU seperti gambar sebagai berikut :

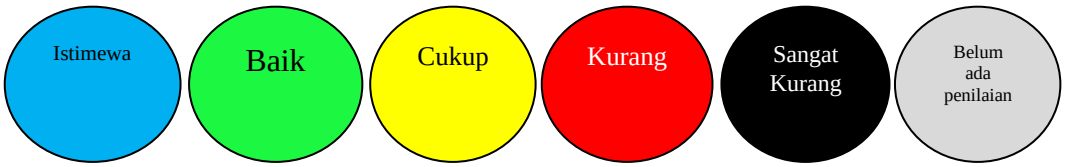

(110-120) (90 -< 110) (70 - <90) (50 - <70) (<50)

Gambar 4. Status indeks capaian IKU

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing- masing Indikator yang ada dalam dokumen *logical framework.*

2.4.2 Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BPPP Ambon dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12), serta tahunan pada akhir tahun anggaran. Pengukuran ditugaskan kepada Tim Pengelola Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPPP Ambon Nomor 19/BPPP.AMB/OT.210/I/2023 tentang Tim Penyusunan laporan Kinerja BPPP Ambon Tahun 2022 dan Triwulanan Tahun 2023. Keanggotaan tim terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua bagian lingkup BPPP Ambon. Berdasarkan laporan bagian penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*Key Perfomance Indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Ambon tahun 2023 sebesar 104,84%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

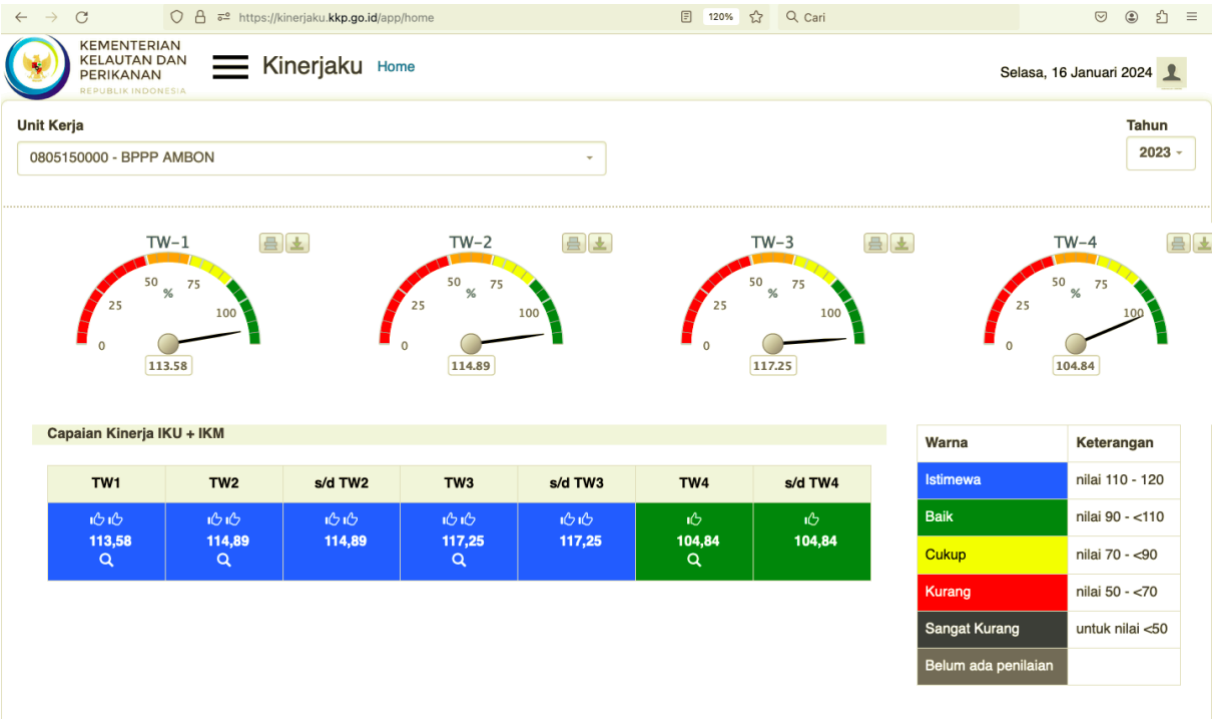

Gambar 5. Dashboard Kinerjaku Level 3 BPPP Ambon

Selama tahun 2023, dari 25 IKU yang menjadi target tahun 2023 BPPP Ambon, ada 1 IKU yang belum memenuhi target dan 24 IKU sisanya semua telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan melebihi target yang telah ditetapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDM KP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BPPP Ambon yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai. BPPP Ambon pada tahun 2023 memiliki beberapa kegiatan prioritas dengan capaian kinerja atas kegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Capaian IKU BPPP Ambon tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Realisasi
Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	70	72,3	103,29
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	3.414	3.560	104,28
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,570	0,71	120
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	90	90	100
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	16	16	100
		6	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket)	2	2	100
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	2.750	3.015	109,64
		8	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	83	88	106,02
		9	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	190	200	105,26
		10	Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)	348	394	113,22
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	11	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Desa Perikanan Cerdas)	1	1	100
		12	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (Kelompok)	1	5	120
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	13	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1	1	100
		14	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1	1	100
Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM						
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	15	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100	100	100
		16	Unit Kerja BPPP Ambon yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1	1	100

		17	Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	93	96,61	103,88
		18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%)	92	116,58	120
		19	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	77	85,87	111,52
		20	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5	0	120
		21	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	80	100	120
		22	Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja BPPP Ambon (Inovasi)	1	1	100
		23	Nilai PM SAKIP Lingkup BPPP Ambon (Nilai)	75	82,45	109,93
		24	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)	93,75	92,28	98,43
		25	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	82	82,42	100,51

Keterangan : Nilai capaian maksimal 120%

Salah satu misi BPPSDM KP dalam mendukung visi Kementerian adalah peningkatan kualitas SDM KP melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan. Dengan fokus kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan maka sasaran strategis tersebut menjadi tujuan utama pencapaian Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dengan didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama atas sasaran strategis tersebut. BPPP Ambon sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi atas pencapaian sasaran strategis tersebut dengan dukungan alokasi anggaran pada setiap IKU sasaran strategis tersebut melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dengan sentuhan kegiatan penyuluhan KP.

Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya pelatihan SDM kelautan dan perikanan terdapat 3 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 1 : Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap Di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%), IKU 2 : Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang Dilatih di BPPP Ambon (Orang) dan IKU 3 : Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)

Indikator Kinerja 1

Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon (%)

Merupakan indikator yang menggambarkan Jumlah lulusan pelatihan yang menunjukkan Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan di DUDI dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

Realisasi capaian IKU Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon pada tahun 2022 sebesar 66,92%, atau melebihi dari target sebesar 65%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 61,63% mengalami peningkatan sebesar 5,29%, dan dibandingkan dengan capaian 2021 sebesar 61,74%, mengalami peningkatan/penurunan sebesar 5,18%

Realisasi capaian IKU 2022 sebesar 66,92%, dibandingkan dengan target renstra tahun 2022 sebesar 65% mengalami peningkatan sebesar 1,92% dan apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 75%, memperlihatkan capaian

-8,08% yang menunjukkan perlu dilakukan berbagai upaya untuk dapat mencapai target IKU pada tahun 2024.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2020, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah dilatih dan menerapkan hasil pelatihannya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus produksi setelah dilatih. Sampai akhir Tahun 2023, BPPP Ambon telah melakukan identifikasi lulusan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri sebesar 72,30% dari lulusan pelatihan.

Tabel 5. Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)

IKU 1-Persentase Lulusan Pelatihan yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
61,63	61,74	66,92	70	72,30	103	8,04	72	100,42

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Perbandingan realisasi Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	100	103	
2	BPPP Tegal	111,19	103	
3	BPPP Banyuwangi	100	103	
4	BPPP Bitung	100,23	103	

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah terdapatnya hasil evaluasi pasca pelatihan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus produksi setelah dilatih, sebagai bahan capaian lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon. Selain itu para lulusan pelatihan dilakukan pendampingan oleh penyuluh secara berkelanjutan untuk dapat menerapkan hasil pelatihan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya perjalanan petugas evaluasi pasca pelatihan secara langsung dengan mengoptimalkan peran penyuluh dilapangan.
2. Kemudahan petugas evaluasi pasca pelatihan dalam merekap hasil evaluasi pasca pelatihan dikarenakan hasil yang dikirm sudah dalam bentuk softcopy sesuai dengan format yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Dilaksanakan kegiatan evaluasi pasca pelatihan untuk mengidentifikasi

purnawidya yang telah terserap di dunia usaha/industri yang mudah dipahami oleh purnawidya.

2. Melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan pelatihan menggunakan instrumen evaluasi pasca pelatihan sebagai bahan masukan untuk perbaikan penyelenggaran pelatihan berikutnya.
3. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh perikanan dalam mengidentifikasi dan melakukan pengisian instrumen evaluasi pasca pelatihan dan pendampingan penerapan hasil pelatihan.

Indikator Kinerja 2

Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (orang).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dilatih dibidang kelautan dan perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

Realisasi IKU pada tahun 2015 sampai dengan 2018 sebanyak 6.784 orang, dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2015 sebanyak 2.992 orang, pada tahun 2016 sebanyak 840 orang, pada tahun 2017 sebanyak 840 orang, pada tahun 2018 sebanyak 1.712 orang, pada tahun 2019 sebanyak 400 orang, pada tahun 2020 sebanyak 1.165 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 1.393 orang dan tahun 2022 sebanyak 2.857 orang. Kegiatan pelatihan bersifat daring dan luring, metode daring ini juga dibantu oleh para penyuluh dilapangan untuk mengawal dan membantu para peserta pelatihan dalam melakukan proses pelatihan baik dalam mengakses aplikasi

SiPintar sebagai sarana digital pelatihan mulai dari pendaftaran sampai akses bahan ajar/modul.

Realisasi capaian IKU Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon pada tahun 2023 sebesar 3.560 orang atau melebihi dari target tahun 2023 sebesar 3.414 orang.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah tersedianya pedoman penyelenggaraan pelatihan, kurikulum dan modul yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi masyarakat KP, instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang dilatihkan, dan sarana prasarana yang terstandar, serta tersedianya database penyelenggaraan pelatihan melalui SIMLAT KP sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pelatihan oleh BPPP Ambon.

Tabel 7. Capaian Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon

IKU 2-Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
1165	1393	2857	3.414	3.560,00	104	24,61	5.000	71,20

Gambar 6. Pelatihan Basic Safety Training

Gambar 7. Pelatihan Budidaya Rumput Laut Mendukung KPB Wakatobi

Gambar 8. Pelatihan Pengoperasian dan Perawatan Mesin Kapal Mendukung Kalaju di Maluku Tenggara

Gambar 9. Pelatihan Daring Terbuka Fish Ckereks mendukung Kalaju Kota Ambon

Gambar 10. Pelatihan Daring Terbuka Penanganan Hama dan Penyakit Rumput Laut mendukung KPB Buru

Gambar 11. Pelatihan Daring Terbuka Perawatan Mesin Motor Tempel mendukung Kalaju Kota Ambon

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Perbandingan realisasi Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	100	104	104
2	BPPP Tegal	106,28	104	97,85
3	BPPP Banyuwangi	100,88	104	103,09
4	BPPP Bitung	105,03	104	99,01

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya penyuluh diwilayah kerja BPPP Ambon yang siap melakukan identifikasi calon peserta pelatihan sesuai dengan bidang pelatihan teknis yang akan dilaksanakan dan membantu melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Perikanan setempat sehingga kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan dengan baik.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya koordinasi persiapan pelatihan
2. Persiapan kegiatan pelatihan yang dilakukan secara intensif oleh panitia pelatihan dan penyuluh pendamping sehingga proses kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan lancar sampai akhir kegiatan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Membuat kalender pelatihan KP sesuai arahan kebijakan pimpinan, kebutuhan daerah dan potensi daerah
2. Bekerjasama dengan Penyuluh pendamping rencana kegiatan pelatihan yang akan diselenggarakan baik secara *zoom meeting* maupun komunikasi secara intensif melalui telepon.

Indikator Kinerja 3

Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar).

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

Cara perhitungan IKU tersebut dengan menjumlahkan seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan yang tercatat pada aplikasi OM SPAM BPPP Ambon.

Realisasi capaian IKU Nilai PNBP Satker BPPP Ambon pada triwulan III tahun 2023 sebesar 0,21 milyar, akan tetapi pada tahun 2020, BPPP Ambon tidak memiliki target PNBP sehingga tidak bisa dibandingkan antara tahun 2020, 2021.

Sampai akhir Tahun 2023 BPPP Ambon telah memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 0,71 Miliar.

Tabel 9. Capaian Nilai PNBP Satker BPPP Ambon

IKU 3-Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
		0,39	0,570	0,71	125	82,05	0,405	175,31

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Perbandingan realisasi Nilai PNBP Satker dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	116,22	125	107,55
2	BPPP Tegal	127,54	125	98,00
3	BPPP Banyuwangi	249,12	125	50,17
4	BPPP Bitung	222,34	125	56,22

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah promosi baik secara langsung maupun pada media sosial BPPP Ambon kegiatan strategis sebagai sumber penghasil PNBP serta membangun jejaring kerjasama dengan stakeholder dalam segi peningkatan kapasitas SDM KP.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Peningkatan PNBP dari sektor pelatihan BST dan penggunaan saran dan prasarana BPPP Ambon.
2. Promosi dengan menggunakan media sosial lebih meningkatkan ruang lingkup promosi bahkan sampai luar Provinsi Maluku, sehingga dapat mengefisiensi anggaran promosi dan petugas yang melakukan promosi tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. kegiatan pelatihan *Basic Safety Trainng* (BST) yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan kerjasama pelatihan yang menggunakan sarana dan prasarana BPPP Ambon yang sangat memadai.

Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan terdapat 1 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 4 : SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi BPPP Ambon (Orang)

Indikator Kinerja 4

SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi adalah yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian. Sertifikat dikeluarkan oleh LSP/BNSP dan atau Lembaga Sertifikasi lainnya.

IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2023, cara perhitungannya dengan menghitung jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi kompetensi di wilayah kerja BPPP Ambon.

Sampai pada akhir tahun 2023, BPPP Ambon sudah melaksanakan sertifikasi profesi terhadap SDM KP sehingga nilai pencapaiannya pada akhir tahun 2023 adalah 90 orang.

Tabel 11. Capaian SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon

IKU 4-SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
			90	90	100		150	60,00

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Perbandingan realisasi SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang) dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	120	100	83,33
2	BPPP Tegal	101,94	100	98,09
3	BPPP Banyuwangi	102,22	100	97,82
4	BPPP Bitung	120	100	83,33

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah jumlah asesor kompetensi BPPP Ambon yang masih memenuhi standar kegiatan sertifikasi kompetensi baik bidang budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, permesinan kapal dan penangkapan ikan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Kelengkapan sarana dan prasarana sertifikasi kompetensi yang tersedia di BPPP Ambon.
2. Promosi dengan menggunakan media sosial lebih meningkatkan ruang lingkup promosi bahkan sampai luar Provinsi Maluku, sehingga dapat mengefisiensi anggaran promosi dan petugas yang melakukan promosi tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. kegiatan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan kerjasama sertifikasi kompetensi dengan sekolah-sekolah yang memutuhkan sertifikasi kompetensi bagi anak didiknya.

Sasaran Kegiatan 3

Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya kaji terap pelatihan KP terdapat 2 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 5 : Lulusan Pelatihan Yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan) di BPPP Ambon (Orang) dan IKU 6 : Tersedianya Materi Pelatihan Berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Orang).

Indikator Kinerja 5

Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (Usaha Rintisan) di BPPP Ambon (orang).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital) dan atau membuat jejaring pasar dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital dan atau jejaring pasar dalam pengembangan usahanya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih. Sampai Tahun 2023, BPPP Ambon telah melakukan identifikasi pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital dan atau jejaring pasar dalam pengembangan usahanya sehingga nilai capaiannya 16 orang.

Tabel 13. Capaian Lulusan Pelatihan Yang Membentuk Star Up (Usaha Rintisan) di BPPP Ambon

IKU 5-Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
5	5	12	16	16	100	33,33	16	100,00

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Perbandingan realisasi Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	100	100	100
2	BPPP Tegal	106,38	100	94,00
3	BPPP Banyuwangi	100	100	100
4	BPPP Bitung	125	100	80

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah kemudahan pengisian instrumen evaluasi pasca pelatihan oleh purnawidya yang nantinya akan menjadi output yang membentuk *start up* (usaha rintisan).

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya perjalanan petugas evaluasi pasca pelatihan secara langsung

sehingga dapat dialihkan untuk kegiatan strategis yang lain yang mendukung peningkatan kinerja BPPP Ambon.

2. Kemudahan petugas evaluasi pasca pelatihan dalam merekap hasil evaluasi pasca pelatihan dikarenakan hasil yang dikirm sudah dalam bentuk softcopy sesuai dengan format yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Telah menyiapkan instrumen Evaluasi pasca pelatihan untuk identifikasi purnawidya yang membentuk *start up* (usaha rintisan)
2. Bekerjasama dengan Penyuluh pendamping kegiatan pelatihan yang telah diselenggarakan dalam identifikasi dan pengisian instrumen Evaluasi pasca pelatihan.

Indikator Kinerja 6

Materi Pelatihan Berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Paket Kaji Widya yang dibuat oleh Instruktur/ Widyasiswara di BPPP yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan materi pelatihan kelautan dan perikanan dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU ini merupakan IKU baru yang ada ditahun 2021. Cara perhitungan ini IKU ini dengan cara mengakumulasi jumlah paket kajiwidya yang dihasilkan oleh BPPP Ambon. Sampai akhir tahun 2023, BPPP Ambon sudah melakukan proses kegiatan

teknis berbasis kaji widya di BPPP Ambon dibidang budidaya perikanan dan permesinan perikanan sehingga nilai capaiannya sebanyak 2 paket.

Tabel 15. Capaian Materi Pelatihan Berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon

IKU 6-Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
5	4	2	2	2	100	0,00	2	100,00

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Perbandingan realisasi Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	100	100	100
2	BPPP Tegal	150	100	66,66
3	BPPP Banyuwangi	100	100	100
4	BPPP Bitung	100	100	100

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah kebutuhan kompetensi tenaga fungsional BPPP Ambon baik widyaiswara dan instruktur sehingga dengan adanya kegiatan kaji widya dapat meningkatkan

kompetensi dan perolehan angka kredit bagi fungsional yang melakukan kegiatan tersebut.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran kaji widya telah dilaksanakan sehingga kebutuhan alat dan bahan dapat dipenuhi secara optimal.
2. Pelatih telah mengetahui progres kegiatan kaji terap telah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Telah memiliki juknis pelaksanaan kegiatan kaji widya sehingga memudahkan tenaga fungsional dalam penyusunan laporan kegiatan.
2. Telah dibuat jadwal Pelaksanaan kegiatan kaji widya yang telah disahkan oleh Kepala BPPP Ambon.

Sasaran Kegiatan 4

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya penyuluhan kelautan dan perikanan terdapat 4 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 7 : Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha Yang Disuluh Di Satminkal BPPP Ambon, IKU 8 : Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok), IKU 9 : Kelompok Kelautan dan Perikanan Yang Dibentuk di Satminkal BPPP Ambon dan IKU 10 : Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (orang)

Indikator Kinerja 7

Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, akan tetapi pola perhitungannya adalah perhitungan secara individu atau perorangan dengan realisasi pada tahun 2018 sebanyak 25.358 orang, pada tahun 2019 sebanyak 34.500 orang, pada tahun 2020 sebanyak 2.686 kelompok dan pada tahun 2021 sebanyak 2.641 kelompok, sampai akhir tahun 2023 Penyuluh Satminkal BPPP ambon sudah melakukan penyuluhan sebanyak 3.015 kelompok dari target Tahun 2023 kelompok yang disuluh sebanyak 2.750 kelompok sehingga nilai pencapaiannya sudah 109,64%.

Tabel 17. Capaian Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon

IKU-7. Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
2.686	2.641	3.012	2.750	3015	110	0,10	5.000	60,30

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Perbandingan realisasi jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	100,13	109,64	109,49
2	BPPP Tegal	100	109,64	109,64
3	BPPP Banyuwangi	100	109,64	109,64
4	BPPP Bitung	100	109,64	109,64

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah kegiatan monitoring capaian IKU yang dilaksanakan oleh Satminkal Penyuluhan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Satminkal dengan Penyuluh Perikanan, pelaporan online penyuluh, SKP yang disertai dengan dokumen pendukung capaian SKP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki kegiatan strategis, yaitu masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya

Gambar 12. Penyuluhan Pada Kelompok budidaya rumput laut di Kab. Kep. Yapen

Gambar 13. Penyuluhan Pada Kelompok pengolahan hasil pemasaran di Kab. Maluku Tengah

Gambar 14. Penyuluhan Budidaya Perikanan di Kabupaten Nabire

Gambar 15. Penyuluhan Pada Kelompok Usaha Bersama di Kota Ternate

Indikator Kinerja 8

Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di satminkal BPPP Ambon (Kelompok).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, akan tetapi pola perhitungannya adalah perhitungan

secara individu atau perorangan dengan realisasi pada tahun 2018 sebanyak 25.358 orang, tahun 2019 sebanyak 34.500 orang, tahun 2020 sebanyak 240 Kelompok, tahun 2021 sebanyak 38 kelompok dan tahun 2022 sebanyak 73 kelompok.

Sampai akhir tahun 2023, Penyuluh Satminkal BPPP ambon telah melakukan peningkatan kelas kelompok pelaku utama/pelaku usaha di Satminkal BPPP Ambon sebanyak 88 kelompok dari target sebanyak 83 kelompok sehingga nilai pencapaiannya sudah 106,02%.

Tabel 19. Capaian Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di satminkal BPPP Ambon

IKU-8. Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
240	38	73	83	88	106	20,55	100	88,00

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Perbandingan realisasi Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	102,04	106,02	103,90
2	BPPP Tegal	100	106,02	106,02
3	BPPP Banyuwangi	100	106,02	106,02
4	BPPP Bitung	107,37	106,02	98,74

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah peningkatan kinerja penyuluhan dilakukan baik secara daring maupun luring oleh Kepala BPPP Ambon dalam rangka merealisasikan indikator kinerja individu yang tercascading langsung kepada indikator kinerja BPPP Ambon.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Penyuluh melakukan pendampingan kelompok dan telah mengidentifikasi dan melakukan peningkatan kelas kelompok terhadap calon kelompok dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan melalui pendampingan yang dilakukan.
3. Surat Keputusan dan verifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Pemerintah Daerah telah ditetapkan.

Indikator Kinerja 9

Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok).

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dibentuk dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, namun merupakan target antara Seksi Penyuluhan dengan penyuluh Satminkal dengan target sebanyak 70 % penyuluh yang melakukan penilaian kelas kelompok. Pada tahun 2019 nilai pencapaian IKU ini sudah mencapai 1.462 unit, tahun 2020 nilai pencapaiannya sebanyak 136 kelompok, tahun 2021 nilai pencapaiannya sebanyak 130 kelompok dan tahun 2022 nilai pencapaiannya sebanyak 232 kelompok, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah kelompok Pelaku utama yang dibentuk yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penumbuhan kelompok yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Sampai akhir tahun 2023, Penyuluh Satminkal BPPP ambon telah melakukan pendataan calon kelompok yang ditumbuhkan kelompoknya sebanyak 200 kelompok dari target tahun 2023 sebanyak 190 kelompok sehingga persentase didapat sebesar 105,26%.

Pembentukan kelompok ditandai dengan penerbitan sertifikat pengukuhan yang ditandatangani oleh pejabat wilayah setempat (lurah, kepala desa atau sejenisnya) dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten/kota.

Tabel 21. Capaian Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon

IKU-9. Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
136	130	232	190	200	105	-13,79	500	40,00

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22. Perbandingan realisasi Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	114,98	110,53	96,12
2	BPPP Tegal	108,96	110,53	101,44
3	BPPP Banyuwangi	101,98	110,53	108,38
4	BPPP Bitung	119,93	110,53	92,16

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah peningkatan kinerja penyuluhan dilakukan baik secara daring maupun luring oleh

Kepala BPPP Ambon dalam rangka merealisasikan indikator kinerja individu yang tercascading langsung kepada indikator kinerja BPPP Ambon.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada tahun 2023.

Gambar 16. Penumbuhan kelompok di Kabupaten Maluku Tengah

Indikator Kinerja 10

Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan. Tenaga kerja yang terlibat langsung di lingkup BPPSDM diantaranya : Penyuluh Perikanan Bantu, UMKM yang disuluh, dan P2MKP dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

Sampai akhir tahun 2023, BPPP ambon telah melakukan identifikasi tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon sehingga nilai pencapaiannya sebesar 394 orang.

Tabel 23. Capaian Tenaga Kerja Yang Terlibat Satker di BPPP Ambon

IKU 10-Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
		620	348	394	113,22	-36,45	348	113,22

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24. Perbandingan realisasi Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	100	113,22	113,22
2	BPPP Tegal	100	113,22	113,22
3	BPPP Banyuwangi	100,31	113,22	112,87
4	BPPP Bitung	100,85	113,22	112,26

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah kemudahan pengisian instrumen tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon baik yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan maupun pengelola Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya perjalanan petugas identifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon secara langsung sehingga dapat dialihkan untuk kegiatan strategis yang lain yang mendukung peningkatan kinerja BPPP Ambon.
2. Kemudahan petugas identifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon dalam merekap hasil evaluasi pasca pelatihan dikarenakan hasil yang dikirm sudah dalam bentuk softcopy sesuai dengan format kuisioner yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Sosialisasi peranan penyuluh perikanan baik PNS, PPB dan Swadaya dalam mengidentifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon

2. Sosialisasi peranan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam mengidentifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Ambon.

Sasaran Kegiatan 5

Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP terdapat 2 (dua) Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 11 : Desa/kawasan Mitra Yang Menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Desa Perikanan Cerdas) dan IKU 12 : Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (Kelompok).

Indikator Kinerja 11

Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Desa Perikanan Cerdas).

Desa/Kawasan mitra merupakan konsep pembangunan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang diwujudkan dalam kegiaan prioritas BPPSDM yaitu Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village (SFV)

Sesuai dengan Keputusan Ka BRSDM No.38/2022, dengan dikembangkannya Desa Perikanan cerdas/*Smart Fisheries Village* (SFV) akan terbentuk desa perikanan unggulan yang produktif yang mampu menerapkan teknlogi dan informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip berkelanjutan

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah Desa yang memanfaatkan teknologi dan

inovasi kelautan dan perikanan tahun 2022 yang dibuktikan dengan MOU/PKS antara Kepala Badan RSDMKP dengan Bupati/Walikota. Sampai akhir Tahun 2023, BPPP Ambon telah melakukan pelaksanaan kegiatan desa inovasi sehingga pencapaiannya sudah 1 paket.

Tabel 25. Capaian Desa/Kawasan Mitra Yang Menerapkan IPTEK di BPPP Ambon

IKU 11-Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
1	1	1	1	1	100,00	0,00	1	100,00

Adapun kegiatan capaian postif yang telah dilakukan di desa Inovasi Desa Poka dalam rangka mendukung program prioritas BPPSDM KP antara lain :

1. Dibidang Penyuluhan, yaitu :
    a. Penumbuhan 5 kelompok baru
    b. Terbentuknya 2 GAPOKAN
    c. Peningkatan kelas kelompok 2 Pokdakan
    d. Fasilitasi modal 2 Pokdakan senilai 275jt
    e. Fasilitasi 13 NIB dan Surat Keterangan Usaha kepada 20 Pokdakan
    f. Fasilitasi Bantuan Pemerintah:
    g. 4 Unit KJA HDPE dan 2.400 ekor bibit Kerapu Bebek dari DJPB dan DKP Provinsi Maluku
    h. 1,8 Ton Pakan Rucah dari Diskan Kota Ambon
    i. 6.300 benih ikan Kuwe dan 19 ton pakan rucah dari BP3 Ambon
    j. Penyerapan tenaga kerja 54 orang di bidang budidaya dan pengolahan

k. Pembangunan Gapura SFV, pemasangan 6 papan informasi SFV, 3 papan penunjuk arah, dan 20 papan nama kelompok

l. 8 kali Gerakan Bersih Poka Pantai (GAROPA) setiap bulan (Mei – Des 2023)

2. Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi dan pemanfaatan Kawasan, Yaitu :

   a. 5 orang anak pelaku utama mengecap Pendidikan pada Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan KKP.

   b. 27 orang taruna/mahasiswa melakukan PKL dan penelitian serta 3 kagiatan deseminasi oleh dosen dan taruna Poltek KP Maluku

   c. Pokdakan Lalosi menjadi tempat praktek Pelatihan Internasional MSG

   d. Ketua Pokdakan Baronang menjadi narasumber pada kegiatan budidaya.

3. Pengembangan Digitalisasi, yaitu :

   a. Perpustakaan Mini Digital

   b. Daftar Menu dan Daftar Tamu Digital di Walang Resto dan Resto Lalosi

   c. Pembayaran berbasis digital/non tunai

   d. Prmosi pemasaran via medsos

4. Dukungan dan Kegiatan Lainnya, Yaitu :

   a. Melalui Balbes Sosek KP dan Puslatluh KP, dilakukan pendampingan kelembagaan Gapokan, Pembinaan Kelembagaan dan Ketenagaan Perkoperasian serta digitalisasi melalui PT. Aruna

   b. Melalui UPT Kemendes dilakukan pendampingan manajemen usaha BUMDES Gemilang Desa Poka

   c. BUMDES Gemilang Desa Poka memiliki usaha Pembesaran Ikan Kuwe dengan jumlah 3.500 ekor (menghasilkan PNBP senilai : **Rp. 13.500.000**)

d. Melalui program BRI, Desa Poka telah ditetapkan sebagai Desa Briliant
e. Dukungan sarana pengangkut sampah pada kegiatan GAROPA setiap bulan dari Dinas LHP Kota Ambon
f. Dukungan kegiatan GAROPA bersama DKP Prov. Maluku dan berbagai stakeholder, melalui Aksi Beach and Underwater CleanUp sekaligus sebagai perayaan HUT RI dan HUT Prov. Maluku ke-78.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26. Perbandingan realisasi Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Desa Perikanan Cerdas) dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	0	100	0
2	BPPP Tegal	100	100	100
3	BPPP Banyuwangi	0	100	0
4	BPPP Bitung	0	100	0

Program Desa mitra/Kawasan mitra Kelautan dan Perikanan bertujuan:

1. Mendayagunakan iptek untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat (desa);
2. Membangun hubungan interaksi antara dunia iptek (*research and development*) dengan dunia usaha di masyarakat (desa);

3. Mendorong masyarakat (desa) untuk mengikuti perkembangan iptek agar usaha masyarakat desa berkembang dan berkelanjutan;
4. Menciptakan produk unggulan spesifik desa (daerah) yang berkualitas; dan
5. Meningkatkan daya saing usaha masyarakat (desa) melalui pemanfaatan iptek kelautan dan perikanan.

Tahapan kegiatan untuk mewujudkan desa inovasi/desa mitra ini meliputi koordinasi dan survei, identifikasi dan penetapan teknologi, perakitan, introduksi teknologi, alih teknologi, pendampingan proses alih teknologi, serta monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Desa mitra/kawasan mitra yang ditetapkan diberikan teknologi dan inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kelautan dan perikanan. Pemanfaatan tersebut dapat terlihat dari terdiseminasikannya teknologi dan atau kebijakan inovatif yang didasarkan atas hasil-hasil riset Perikanan kepada stakeholder di desa. Selain itu, dapat pula memberikan masukan penetapan kebijakan riset dari umpan balik stakeholders sehingga dihasilkan teknologi dan atau kebijakan yang bersifat inovatif dan tepat guna.

Indikator Kinerja 12

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan

dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna. Pemilihan lokasi percontohan melalui tahap koordinasi dengan pemerintah setempat dan proposal perontohan telah disetujui oleh Pusat pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pelaksanaa percontohan dan Pedoman SFV.

IKU ini sudah ada pada tahun 2019 dengan pencapaian sebanyak 2 kelompok, pada tahun 2020 sebanyak 1 kelompok, pada tahun 2021 sebanyak 1 Paket dan pada tahun 2022 sebanyak 1 paket.

Sampai akhir Tahun 2023, BPPP Ambon sudah melakukan kegiatan percontohan penyuluhan KP sebanyak 5 kelompok di Kawasan Kampung Nelayan Modern Samber Binyeri Kab. Biak Numfor

Tabel 27. Capaian Jumlah percontohan penyuluhan KP yang diterapkan di BPPP Ambon

IKU 12- Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (Kelompok)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
1	1	1	1	5,00	500	400,00	2	250,00

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 28. Perbandingan realisasi Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	100	500	500
2	BPPP Tegal	0	500	0
3	BPPP Banyuwangi	0	500	0
4	BPPP Bitung	100	500	500

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah peningkatan kinerja penyuluhan dilakukan baik secara daring maupun luring oleh Kepala BPPP Ambon dalam rangka merealisasikan indikator kinerja individu yang tercascading langsung kepada indikator kinerja BPPP Ambon.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu lokasi percontohan penyuluhan KP yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya :

1. Kepala BPPP Ambon memberikan surat instruksi/memorandum kepada penyuluh Satminkal terkait pemenuhan kinerja untuk pencapaian IKU tersebut berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi rencana aksi tahun 2021 capaian kinerja tahun 2021 sehingga para penyuluh memiliki kinerja yang lebih baik dengan merealisasikan tunjangan kinerja nya dan PPB untuk mengirimkan bukti pembayaran BOP setiap bulannya dan melakukan pembayaran BOP penyuluh PNS maupun PPB secara tepat waktu sebagai bukti bahwa penyuluh telah melakukan penyuluhan kepada kelompok utama/usaha binaanya dan melakukan kegiatan pembentukan kelompok.
2. Pelaksanaan kegiatan percontohan KP berdasarkan juknis yang telah ditetapkan oleh Puslatluh KP.

Sasaran Kegiatan 6

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP terdapat 2 (dua) Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 13 : Jumlah Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Ambon (Unit) dan IKU 14 : Jumlah Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Ambon (Unit).

Indikator Kinerja 13

Sarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Ambon (unit).

Merupakan indikator Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP Ambon dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2021, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal. Sampai akhir Tahun 2023, BPPP Ambon sudah melakukan tahap pengadaan sarana sebagai penunjang pelatihan dan penyuluhan KP sehingga nilai pencapaiannya 1 paket.

Tabel 29. Capaian Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Ambon

IKU 13- Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
	1	1	1	1	100,00	0,00	1	100,00

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 30. Perbandingan realisasi Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	100	100	100
2	BPPP Tegal	50	100	200
3	BPPP Banyuwangi	100	100	100
4	BPPP Bitung	100	100	100

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah seluruh Proses pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan di LPSE.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan dengan baik dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan dengan harga penawaran lebih rendah dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pejabat pengadaan barang dan jasa telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan
2. BPPP Ambon membuat komitmen terkait penyelesaian Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Indikator Kinerja 14

Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Ambon (unit).

Merupakan indikator Peningkatan kapasitas prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP Ambon dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2021, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah Prasarana yang berbentuk pembangunan dan renovasi bangunan/belanja modal. Sampai akhir Tahun 2023, BPPP Ambon sudah melakukan tahap pembangunan prasarana sebagai penunjang pelatihan dan penyuluhan KP sehingga nilai pencapaiannya telah 1 paket.

Tabel 31. Capaian Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Ambon

IKU 14- Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
	1	1	1	1	100,00	0,00	1	100,00

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 32. Perbandingan realisasi Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	100	100	100
2	BPPP Tegal	100	100	100
3	BPPP Banyuwangi	100	100	100
4	BPPP Bitung	0	100	0

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah seluruh proses pengadaan/pekerjaan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan di LPSE.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan dengan baik dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan dengan harga penawaran lebih rendah dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pejabat pengadaan barang dan jasa telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan
2. BPPP Ambon membuat komitmen terkait penyelesaian Kegiatan pengadaan/pekerjaan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPP Ambon

Sasaran Kegiatan 1

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon

Untuk mencapai Sasaran kegiatan Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon terdapat 11 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 15 : Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon, IKU 16 : Unit Kerja BPPP Ambon Yang Lolos Penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP, IKU 17 : Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon, IKU 18 : Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon, IKU 19 : Indeks profesionalitas ASN BPPP Ambon, IKU 20 : Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK BPPP Ambon Dibandingkan Realisasi Anggaran BPPP Ambon TA. 2022, IKU 21 : Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BPPP Ambon, IKU 22 : Unit Kerja BPPP Ambon Yang Menerapkan Inovasi

Pelayanan Publik, IKU 23 : Nilai PM SAKIP Lingkup BPPP Ambon, IKU 24 : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Ambon dan IKU 25 : Nilai kinerja anggaran BPPP Ambon.

Indikator Kinerja 15

Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%).

Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon berupa tersedianya laporan-laporan kegiatan BPPP Ambon.

Perhitungan Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon ini dihitung berdasarkan pemenuhan laporan-laporan kegiatan BPPP Ambon berupa laporan tahunan, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dan laporan keuangan.

Perhitungan ini dilakukan setiap triwulan tahun 2023, sesuai dengan data dukung yang telah dikerjakan sehingga nilai pencapaian telah 100 %. Adapun dokumen yang harus disediakan pada akhir tahun 2023 terdiri dari pemenuhan 82 dokumen yaitu :

Tabel 33. Pemenuhan dokumen Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon

No.	Nama Dokumen	Target	Realisasi	% Realisasi	Keterangan
1	Laporan SPIP	4	4	100	TU
2	Laporan PIPK	1	1	100	TU
3	Laporan BMN	1	1	100	TU
4	Laporan LKj	4	4	100	Program dan Monev
5	Renaksi	3	3	100	Program dan Monev
6	Evaluasi Renaksi	3	3	100	Program dan Monev
7	PK	3	3	100	Program dan Monev
8	Laporan Mingguan	48	48	100	Program dan Monev

9	Laporan Bulanan	12	12	100	TU
10	Laporan Tahunan	1	1	100	TU
11	Laporan Keuangan	1	1	100	TU
12	Laporan SIMLAT	1	1	100	Pelatihan
TOTAL		**82**	**82**	**100**	

Tabel 34. Capaian Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon

IKU 15- Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
	100	100	100	100	100,00	0,00	100	100,00

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 35. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	106,33	100	94,04
2	BPPP Tegal	100	100	100
3	BPPP Banyuwangi	100	100	100
4	BPPP Bitung	100	100	100

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pembuatan seluruh laporan yang merupakan bagian dari layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini dengan mengetahui Progres capaian IKU triwulanan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh penyusunan laporan yang merupakan bagian dari layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon tersebut telah didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pemenuhan dokumen tersebut dapat dilakukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh dokumen yang telah ditargetkan dapat terpenuhi dengan baik.

Indikator Kinerja 16

Unit Kerja BPPP Ambon Yang Lolos Penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik, Pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan Diusulkan menjadi ZI Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan sebelum diusulkan. IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2022. Perhitungan Unit Kerja BPPP Ambon Yang lolos penilaian WBK, Tim penilai Internal KKP adalah Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP dan sampai pada

tahun 2023, BPPP Ambon telah lolos penilaian WBK, tim penilai internal KKP sehingga nilai pencapaiannya telah 1 unit.

Tabel 36. Capaian Unit Kerja BPPP Ambon Yang Lolos Penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP

IKU 16-Unit Kerja BPPP Ambon yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
			1	1	100,00		1	100,00

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 37. Perbandingan realisasi Unit Kerja BPPP Ambon yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	0	100	0
2	BPPP Tegal	0	100	0
3	BPPP Banyuwangi	0	100	0
4	BPPP Bitung	0	100	0

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah tersedianya form *Time Line* terkait pembuatan seluruh dokumen seluruh area perubahan dalam Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK).

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, ada beberapa capaian positif yang juga diperoleh BPPP Ambon, diantaranya:

1. Progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
2. Sosialisasi masing-masing tim pokja area perubahan setiap apel pagi dilaksanakan sehingga seluruh pegawai memahami pembangunan BPPP Ambon Untuk Diusulkan Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK).

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan.

Indikator Kinerja 17

Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon (nilai).

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKJ), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

Penghitungan Nilai Rekonsilasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu:

a. Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III

b. Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data

c. Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2022 pada aplikasi kinerjaku

Sampai akhir tahun 2023, BPPP Ambon telah dilakukan penilaian rekonsilasi kinerja yang dilakukan oleh Sekertaris BPPSDM KP sehingga nilai pencapaiannya telah 96,61%.

Tabel 38. Capaian Nilai Rekonsilasi Kinerja di BPPP Ambon

IKU-17. Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)								
Realisasi				2023			Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
	97,24	96,83	93	96,61	104	-0,23	93	103,88

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 39. Perbandingan realisasi Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	105,76	103,88	98,22
2	BPPP Tegal	101,08	103,88	102,77
3	BPPP Banyuwangi	102,89	103,88	100,96
4	BPPP Bitung	101,05	103,88	102,80

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pembuatan seluruh dokumen dan laporan untuk dapat meningkatkan aspek-aspek kinerja pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh pemenuhan dokumen dan laporan harus memiliki konsistensi kepatuhan dalam penyusunan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. SDM yang menangani pemenuhan rekonsilisasi kinerja pun telah memiliki pemahaman yang baik terkait pemenuhan IKU tersebut dengan mengikuti kegiatan pra rekonsiliasi kinerja yang diselenggarakan oleh Sekertaris BPPSDM KP.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progress yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023.

Indikator Kinerja 18

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%).

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Jumlah unit kerja yang tergabung dalam media yang *menshared* data sesuai dengan data yang di distribusikan dalam aplikasi *Btrix* pada triwulan I dan II Tahun 2023, namun pada Triwulan II menggunakan aplikasi Collaboration Office dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan. IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 70,80 % dan tahun 2018 sebesar 95,23%, tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100% dan tahun 2021 sebesar 100%. Sampai akhir triwulan III Tahun 20223 BPPP Ambon memperoleh nilai hasil perhitungan IKU ini oleh Puslat KP

Berdasarkan surat dari Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor B.90/BPPSDM.1/TU.210/I/2024 tentang Capaian Nilai Akhir IKU MP Terstandar Lingkup KKP, Dari target sebesar 92% pada tahun 2023 diperolehan nilai sebesar 116,58%. Hal ini dikarenakan keaktifan para pejabat dalam menshare manajemen pengetahuan secara kontinyu dan pemenuhan dokumen kinerja yang diupload pada aplikasi *Collaboration Office*.

Tabel 40. Capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon

IKU-18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%)								
Realisasi				2023			Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
100	100	133,33	92,0	116,58	126,72	-12,56	92	126,72

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 41. Perbandingan realisasi unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	126,72	126,72	100
2	BPPP Tegal	126,72	126,72	100
3	BPPP Banyuwangi	126,72	126,72	100
4	BPPP Bitung	126,72	126,72	100

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah jaringan internet yang memadai dalam media yang *menshared* data sesuai dengan data yang di distribusikan dalam aplikasi *Portal Collaboration Office* dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, maka BPPP ambon dapat melakukan Efisiensi anggaran terkait pemenuhan IKU ini, Subkoordinator Program dan Monev akan mengupload rekapan seluruh pejabat dan

operator yang sudah memenuhi data pada aplikasi *Portal Collaboration Office* melalui WA grup yang dapat terbaca oleh seluruh pejabat dan operator untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, Subkoordinator Program dan Monev secara rutin merekap seluruh pejabat dan operator yang tergabung pada media aplikasi *Portal Collaboration Office* sebelum akhir bulan berjalan pada WA grup Balai dan mengingatkan kepada pejabat dan operator yang belum mengupload data agar dapat segera mengupload pada akun masing-masing.

Indikator Kinerja 19

Indeks profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks).

Indeks profesionalitas ASN dimaksud terdiri dari Kehadiran Pegawai, Capaian Kinerja (SKP), LHKASN/LHKPN, terhadap Pejabat yang telah dilakukan Asesmen. IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 81,51 % dan tahun 2018 sebesar 93,25%, tahun 2019 sebesar 75,88%, tahun 2020 sebesar 76,28% dan tahun 2021 sebesar 77,18%. Perhitungan ini juga dapat dilihat melalui website http://ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/eselon dengan perhitungan nilai sebagai berikut :

= Indeks kualifikasi pendidikan ASN + Indeks disiplin ASN + Indeks kinerja ASN + Indeks kompetensi ASN

Perhitungan IKU ini dilaksanakan setiap semesteran.

Realisasi capaian IKU Indeks profesionalitas ASN BPPP Ambon pada tahun 2022 sebesar 80,67 atau melebihi dari target sebesar 76%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 76,28% mengalami peningkatan sebesar 4,39 dan dibandingkan dengan capaian 2021 sebesar 77,18%, mengalami peningkatan sebesar 3,49.

IKU ini direalisasikan setiap semester dan pada akhir tahun berjalan dengan perolehan nilai sebesar 85,87.

Tabel 42. Capaian Indeks Profesionalitas ASN di BPPP Ambon

IKU 19-Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
76,28	77,18	80,67	77	85,87	111,51	6,45	77	111,52

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 43. Perbandingan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	116,21	111,52	95,96
2	BPPP Tegal	107,34	111,52	103,89
3	BPPP Banyuwangi	107,75	111,52	103,49
4	BPPP Bitung	107,97	111,52	103,28

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah dukungan seluruh pegawai di lingkup BPPP Ambon, operator simpeg dan pengelola kepegawaian lainnya. Untuk mendapatkan data-data terkini, masing-masing pegawai dapat mengunggah dokumen bukti diklat-diklat yang diikuti dan melakukan entri data diklat atau seminar yang diikuti, atau menyerahkan kepada operator simpeg untuk dilakukan entri data sehingga nilai kompetensi pegawai dapat sesuai. Media sosial *Whatsapp* menjadi salah satu alat komunikasi untuk penyampaian pemutakhiran data, dan memonitor pergerakan nilai sehingga target IKU ini dapat tercapai.

Meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19, namun dengan berbagai upaya target Nilai IP ASN BPPP Ambon ini diharapkan dapat tercapai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan-pelatihan secara daring. Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan atau keberhasilan tercapaianya target Nilai IP ASN BPPP Ambon ini antara lain disebabkan oleh:

1. Terdapat pegawai lingkup BPPP Ambon yang mendapatkan peningkatan pendidikan, sehingga kualifikasi pendidikannya meningkat;
2. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan dan seminar daring;
3. Komitmen pimpinan dan kesadaran untuk meningkatkan kompetensi secara daring;
4. Kesadaran pegawai untuk menyampaikan sertifikat pengembangan kompetensi kepada pengelola kepegawaian; dan

Keaktifan pengelola kepegawaian dalam mengingatkan dan memutakhirkan data peningkatan kompetensi maupun pendidikan.

Indikator Kinerja 20

Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK BPPP Ambon (%).

Merupakan indikator batas tertinggi presentase temuan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPPP Ambon dibandingkan realisasi tahun 2021.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2018, realisasi pada tahun 2018 sebesar 0 %, pada tahun 2019 juga sebesar 0%, pada tahun 2020 sebesar 0,01%, pada tahun 2022 sebesar 0,01% dan pada tahun 2022 sebesar 0%.

Salah satu untuk menciptakan pengelolaan yang bersih adalah pemeriksaan rutin oleh BPK. Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPSDM KP yang dihitung akhir tahun 2023. Perhitungan ini berdasarkan total temuan nilai kepatuhan dibandingkan dengan pagu total yang bersifat minimize artinya semakin kecil realisasi dibandingkan dengan target maka semakin besar pula nilai capaian kinerja yang diperoleh sehingga nilai pencapaiannya telah 0.

Tabel 44. Capaian Persentase PenyelesaianTemuan BPK Satker BPPP Ambon

IKU 20-Persentase Penyelesaian Temuan BPK Satker BPPP Ambon (%)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0,01	1	0	0,5	0	0,00		≤0,5	

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 45. Perbandingan realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK Satker BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	125	125	100
2	BPPP Tegal	100	125	125
3	BPPP Banyuwangi	125	125	100
4	BPPP Bitung	100	125	125

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah tersedianya SOP terkait penggunaan anggaran yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, 87rogress capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh penggunaan anggaran yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progress yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023.

Indikator Kinerja 21

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon I lingkup KKP.

Cara perhitungan IKU ini dengan cara Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 70% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

$$\% \text{ Rekomendasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen}}{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Sudah Ditindaklanjuti Secara Tuntas}} \times 100\%$$

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPSDM KP yang akan dihitung setiap triwulanan dan berdasarkan surat dari Sekertaris BPPSDM KP Nomor B.292/BPPSDM.1/RC.610/I/2024 tanggal 14 Januari 2024 tentang Capaian IKU Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan IV Tahun 2023 Lingkup BRSDM KP, BPPP Ambon telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan sebesar 100%

Tabel 46. Capaian Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon

IKU-21. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
		100	80	100	125,00	0	80	125,00

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 47. Perbandingan realisasi Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	125	125	100
2	BPPP Tegal	125	125	100
3	BPPP Banyuwangi	125	125	100
4	BPPP Bitung	125	125	100

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pengisian aplikasi SIDAK KKP yang merupakan bagian dari penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.

Kegiatan strategis yang telah dilakukan adalah peningkata kompetensi operator yang menangani aplikasi SIDAK KKP sehingga progres capaian IKU tahunan dapat

terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi SIDAK KKP sesuai dengan SOP turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progres yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023.

Indikator Kinerja 22

Unit Kerja BPPP Ambon Yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)

Merupakan usulan proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup BPPP Ambon dengan persyaratan sebagai berikut :

- KRITERIA INOVASI : Memiliki Kebaruan, Efektif, Bermanfaat, Dapat Ditransfer/Direplikasi dan Berkelanjutan
- KELOMPOK INOVASI : Kelompok Umum, Kelompok Khusus

IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2023, cara perhitungannya dengan menghitung jumlah Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 75.

Sampai pada akhir tahun 2023, BPPP Ambon telah mengajukan proposal pada aplikasi Sinovik untuk diikutkan dalam perlombaaan Sinovik 2023 sehingga nilai pencapaiannya sebesar 1 unit.

Tabel 48. Capaian Unit Kerja BPPP Ambon Yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik

IKU-22. Unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
			1	1	100,00		1	100,00

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 49. Perbandingan realisasi Unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	0	100	0
2	BPPP Tegal	0	100	0
3	BPPP Banyuwangi	0	100	0
4	BPPP Bitung	0	100	0

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya aplikasi SiPintar. Dengan adanya aplikasi "Sistem Pelatihan Terintegrasi Berbasis *Smartphone* Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon (SiPintar BPPP Ambon) menjadi sebuah sistem yang fleksibel dan mudah diakses, kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun serta data pelatihan terintegrasi melalui aplikasi berbasis "Smartphone", informasi tersaji lebiih cepat, tepat sesuai kebutuhan dan

terjamin akurasinya. Kualitas pelayanan publik pun meningkat dengan terintegrasinya kegiatan pelatihan baik teknis maupun manajerial dibidang perikanan, efisiensi waktu dan biaya, pemantauan/pendampingan kegiatan usaha pasca mengikuti kegiatan pelatihan secara rill time dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor Pelatihan KP.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Aplikasi SiPintar yang telah memiliki fitur-fitur kegiatan pelatihan mulai dari hulu sampai hilir
2. Promosi dengan menggunakan media sosial lebih meningkatkan ruang lingkup promosi bahkan sampai luar Provinsi Maluku, sehingga dapat mengefisiensi anggaran promosi dan petugas yang melakukan promosi tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Identifikasi kebutuhan pelatihan telah menggunakan aplikasi SiPintar
2. Pendaftaran peserta pelatihan telah menggunakan aplikasi SiPintar
3. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan telah menggunakan aplikasi SiPintar

Indikator Kinerja 23

Nilai PM SAKIP Lingkup BPPP Ambon (Nilai)

Nilai PM SAKIP Satker dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Satker .

IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2023, cara perhitungannya dengan menghitung nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Tim SAKIP BPPSDM.

Sampai pada akhir tahun 2023, BPPP Ambon telah dilakukan penilaian mandiri SAKIP sehingga nilai pencapaiannya sebesar 82,45.

Tabel 50. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup BPPP Ambon

IKU 23-Nilai PM SAKIP Lingkup BPPP Ambon (Nilai)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
			75,0	82,45	109,93		75,00	109,93

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 51. Perbandingan realisasi Nilai PM SAKIP Lingkup BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	109,67	109,93	100,23
2	BPPP Tegal	116	109,93	94,76
3	BPPP Banyuwangi	105,84	109,93	103,86
4	BPPP Bitung	106,82	109,93	102,91

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya aplikasi Kinerjaku yang telah memuat menu template penilaian mandiri SAKIP sehingga memudahkan dalam penyusunan dokumen penilaian mandiri SAKIP.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani SAKIP
2. Aplikasi Kinerjaku yang memuat menu tamplate penilaian mandiri SAKIP
3. Operator yang menangani penilaian mandiri SAKIP dan Kinerjaku masih petugas yang sama sehingga memudahkan pemahaman pemenuhan dokumen penilaian mandiri SAKIP BPPP Ambon.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM KP melalui kegiatan *Kick Off Meeting* Implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh BRSDM KP pada tangal 12 sampai dengan 14 April 2023
2. Dokumen penilaian mandiri SAKIP telah disusun dari awal tahun sebagai

dokumen persyaratan pemenuhan dokumen Kinerja per triwulan

3. Penyimpanan dokumen penilaian mandiri SAKIP terletak pada Google Drive milik BPPP Ambon

Indikator Kinerja 24

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Ambon (nilai).

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 90,50%, tahun 2018 sebesar 86,83%, pada tahun 2019 sebesar 95,39%, tahun 2020 sebesar 92,83%, tahun 2021 sebesar 97,44% dan tahun 2022 sebesar 94,48%

Terdapat 12 indikator penilaian yaitu: Pengelolaan UP, Data Kontrak, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Hal III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian tagihan Rekon LPJ, Renkas, Realisasi, PAGU Minus dan Dispensasi SPM.

Perolehan nilai ini berdasarkan perhitungan pada aplikasi OM SPAN BPPP Ambon dan BPPP Ambon mempeoleh nilai 92,28, nilai ini masih dibawah target dikarenakan ada Penyerapan Anggaran yang oleh sistem di SAKTI belum tercatat akibat SP2D Void yang masuk di tanggal 02 Januari 2024. Nilai Capaian Output 100 itu harus dibarengi realisasi fisik dan realisasi keuangan. Fisik yang diinput di SAKTI telah 100%, akan tetapi penyerapannya yang masih terkendala oleh sistem akibat SP2D Void tersebut sehingga realisasi capaian output tidak bisa 100%.

Tabel 52. Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BPPP Ambon

IKU-24. Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
92,83	97,44	94,48	93,75	92,28	98,43	-2,33	94	98,43

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 53. Perbandingan realisasi Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	102,98	98,43	95,58
2	BPPP Tegal	0	98,43	0
3	BPPP Banyuwangi	102,01	98,43	96,49
4	BPPP Bitung	102,36	98,43	96,16

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pengisioan aplikasi OM SPAN yang merupakan bagian dari Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Ambon.

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi OM SPAN oleh SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progres yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023.

Indikator Kinerja 25

Nilai kinerja anggaran BPPP Ambon (nilai).

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 90,50%, tahun 2018 sebesar 86,83%, pada tahun 2019 sebesar 95,39%, pada tahun 2020 sebesar 92,03%, pada tahun 2021 sebesar 85,58% dan pada tahun 2022 sebesar 86,99%

Perhitungan ini berdasarkan perhitungan pada aplikasi SMART DJA dan capaiannya diperoleh nilai sebesar 82,42.

Tabel 54. Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon

IKU-25. Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)								
Realisasi			2023				Renstra KKP 2020 – 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
92,03	85,58	86,99	82	82,42	100,51	-5,25	89	92,61

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka

perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 55. Perbandingan realisasi Nilai Kinerja Angaran BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Ambon	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	105,24	100,51	95,50
2	BPPP Tegal	107,76	100,51	93,27
3	BPPP Banyuwangi	104,45	100,51	96,22
4	BPPP Bitung	104,99	100,51	95,73

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progres yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran BPPP Ambon pada Tanggal 31 Desember 2023, dapat dilihat pada tabel 56 berikut :

Tabel 56. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

No	KEGIATAN/RO	TARGET	REALISASI	%
1	ABW.002 Kaji Terap	120.000.000	119.996.270	100,00
2	DCC.001 Sertifikasi Kompetensi	54.000.000	54.000.000	100
3	QDD.001 Kelompok Pelaku Utama	6.090.040.000	6.083.197.040	99,89
4	QDD.002 Percontohan	929.250.000	929.242.350	100,00
5	RAL.001 Sarana	1.448.784.000	1.448.613.670	99,99
6	RBQ. 001 Prasarana	200.000.000	199.757.880	100

7	SCC.001 Pelatihan KP yang dilatih	3.252.679.000	3.229.960.228	99,30
8	Dukman	460.311.000	460.189.435	99,97
9	Gaji dan Tunjangan	42.004.580.000	39.607.674.806	94,29
10	Operasional	9.528.748.000	11.332.539.586	118,93
	TOTAL	**64.088.392.000**	**63.465.171.265**	**99,03**

Secara umum kinerja BPPP Ambon pada tahun 2023 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi kepada penyuluh PNS dan PPB Satminkal BPPP Ambon tentang mekanisme pembayaran BOP sehingga anggaran BOP Penyuluh PNS dan PPB dapat dibayarkan penuh setiap bulannya.

Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama BPPP Ambon disajikan dalam bentuk sebagai berikut :

Tabel 57. Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	9.800.000	9.800.000	100,00
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	2.544.535.000	2.544.535.000	100,00
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Milyar)	408.144.000	408.144.000	100,00
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	54.000.000	54.000.000	100,00
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	9.800.000	9.800.000	100,00
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket)	120.000.000	119.996.270	100,00
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan	7	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	96.000.000	96.000.000	100,00

	Perikanan	8	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	21.000.000	21.000.000	100,00
		9	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	23.000.000	23.000.000	100,00
		10	Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)	5.950.040.000	5.950.040.000	100,00
4	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	11	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Desa Perikanan Cerdas) (Paket)	929.250.000	929.242.350	100,00
		12	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (Kemlompok)	300.000.000	300.000.000	100,00
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	13	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1.448.784.000	1.448.613.670	99,99
		14	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	200.000.000	199.757.880	99,88
6	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	15	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	42.004.580.000	41.381.783.095	98,52
		16	Unit Kerja BPPP Ambon yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	305.100.000	305.100.000	100,00
		17	Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	16.800.000	16.800.000	100,00
		18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%)	19.800.000	19.800.000	100,00
		19	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	9.528.748.000	9.528.748.000	100,00
		20	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA 2022 (%)	20.105.000	20.105.000	100,00
		21	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	9.800.000	9.800.000	100,00
		22	Unit Kerja BPPP Ambon yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)	20.106.000	20.106.000	100,00
		23	Nilai PM SAKIP Lingkup BPPP Ambon (Nilai)	9.800.000	9.800.000	100,00
		24	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)	19.600.000	19.600.000	100,00
		25	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	19.600.000	19.600.000	100,00
			Total	**64.088.392.000**	**63.465.171.265**	**99,03**

3.4 Efisiensi Anggaran BPPP Ambon

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggung- jawaban

mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Penghitungan efisiensi anggaran dapat dilihat pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Dasar hukum terkait penghitungan efisiensi terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
37	[illegible]	[illegible]	92,90	89,15	91,69	100,00	13,66	84,15
40	[illegible]	[illegible]	88,50	95,21	99,45	100,00	4,69	61,72
6	[illegible]	[illegible]	88,36	96,32	98,34	100,00	4,64	61,60
30	[illegible]	[illegible]	88,14	94,51	94,75	100,00	5,49	63,72
21	[illegible]	[illegible]	87,86	96,34	99,40	100,00	3,66	59,16
12	[illegible]	[illegible]	87,70	96,50	99,09	100,00	3,50	58,76
2	[illegible]	[illegible]	87,67	96,42	99,68	100,00	3,58	58,94
31	[illegible]	[illegible]	87,60	96,36	98,09	100,00	3,64	59,10
33	[illegible]	[illegible]	87,02	97,77	99,68	100,00	2,23	55,57
13	[illegible]	[illegible]	86,46	98,41	98,61	100,00	1,63	54,07
16	[illegible]	[illegible]	86,46	98,69	99,75	100,00	1,31	53,27
36	[illegible]	[illegible]	86,45	98,68	99,65	100,00	1,32	53,31
22	[illegible]	[illegible]	86,37	98,54	98,72	100,00	1,46	53,66
1	[illegible]	[illegible]	86,32	98,09	96,91	100,00	1,91	54,79
3	[illegible]	[illegible]	86,30	98,96	99,76	100,00	1,05	52,61
35	[illegible]	[illegible]	86,23	98,49	97,79	100,00	1,51	53,78
10	[illegible]	[illegible]	86,21	97,76	95,17	100,00	2,24	55,60
15	[illegible]	[illegible]	86,19	99,12	99,68	100,00	0,88	52,20
8	[illegible]	[illegible]	86,18	98,99	99,23	100,00	1,01	52,52
27	[illegible]	[illegible]	86,16	99,04	99,27	100,00	0,96	52,40
14	[illegible]	[illegible]	86,11	99,12	99,25	100,00	0,88	52,20
7	[illegible]	[illegible]	86,09	99,04	99,97	100,00	0,60	51,51
9	[illegible]	[illegible]	86,06	99,21	99,31	100,00	0,79	51,97
34	[illegible]	[illegible]	86,02	99,40	99,70	100,00	0,60	51,51
18	[illegible]	[illegible]	86,00	99,36	99,48	100,00	0,64	51,60
20	[illegible]	[illegible]	85,96	99,09	98,47	100,00	0,91	52,27
39	[illegible]	[illegible]	85,98	99,33	99,24	100,00	0,67	51,69
11	[illegible]	[illegible]	85,96	98,81	97,41	100,00	1,19	52,97
19	[illegible]	[illegible]	85,95	99,55	99,80	100,00	0,45	51,14
28	[illegible]	[illegible]	85,92	99,41	99,19	100,00	0,59	51,48
24	[illegible]	[illegible]	85,88	98,24	94,98	100,00	1,76	54,41
17	[illegible]	[illegible]	85,84	99,83	99,85	100,00	0,26	50,65
25	[illegible]	[illegible]	85,77	99,89	99,03	100,00	0,36	50,90
29	[illegible]	[illegible]	85,66	99,96	99,64	100,00	0,04	50,11
5	[illegible]	[illegible]	85,65	99,60	98,34	100,00	0,40	51,01
32	[illegible]	[illegible]	84,89	98,64	90,94	100,00	1,36	53,41
26	[illegible]	[illegible]	84,58	98,22	87,82	100,00	1,79	54,45
41	[illegible]	[illegible]	84,54	99,74	92,74	100,00	0,26	50,66
23	[illegible]	[illegible]	84,07	98,97	87,52	100,00	1,03	52,59
38	[illegible]	[illegible]	83,72	96,98	78,86	100,00	3,02	57,55
4	[illegible]	[illegible]	82,42	98,99	99,70	95,45	-1,61	45,97

Gambar 17. Nilai efisiensi pada aplikasi SMART

Efisiensi anggaran BPPP Ambon pada Tahun 2023 memperoleh skor -1,61. Efisensi anggaran menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20 sampai dengan -20. Kondisi ini dipengaruhi oleh Nilai pencapaian Seluruh target IKU pada Tahun 2023 telah pencapaian 100%, Pencapaian nilai efisiensi sebesar 45,97 menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2023, terdapat efisiensi baik efisiensi keluaran maupun efisiensi kegiatan telah berjalan dengan baik. Kondisi

ini perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran di tahun berikunya.

Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai efisiensi anggaran pada BPPP Ambon yaitu;

a. Perencanaan, efisiensi anggaran dilakukan BPPP Ambon dalam beberapa dimensi, yaitu:
b. Dimensi efisiensi pertama mengutamakan manfaat. Oleh karena itu dibuat inisiatif strategis berupa indikator outcome dan pengawalannya.

   Dimensi efisiensi kedua menetapkan prioritas kegiatan. Pada tahun 2022 BPPP Ambon telah menetapkan kegiatan prioritas yang pengawalannya dilakukan secara rutin (*weekly report*) dan berkala (pembahasan bulanan) untuk mendapatkan rekomendasi memadai.

   Dimensi efisiensi ketiga berupa pemangkasan alokasi anggaran perjalanan dinas dan pertemuan. dialihkan kepada kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal ini dukungan untuk prioritas nasional/KKP dalam rangka peningkatan produksi budidaya. Disamping itu, pada masa pandemi Covid-19, pos-pos anggaran yang tercatat berlebih diantaranya belanja pegawai dialihkan untuk kebutuhan penanggulangan Covid-19 beserta dampaknya.
c. Pelaksanaan, strategi pelaksanaan kegiatan untuk efisiensi terutama dalam hal perjalanan dinas/paket meeting, sehingga volume capaian dapat melebihi target

atau dipergunakan untuk output baru. Implementasi efisiensi ini diantaranya berupa:

- Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan berbasis daring;
- Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, supervisi, dan evaluasi dilaksanakan secara daring dan blended (tatap muka dan daring);
- Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan dilaksanakan secara digitalisasi melalui video conference *dan live streaming*;
- Melaksanakan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dengan pimpinan berbasis *Balance Score Card* dan SKP;
- Membayarkan biaya operasional Penyuluh Perikanan PNS dan PPB sesuai kinerja yang dilaporkan dan sepengetahuan Kepala Dinas KP sebagai pengguna.
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam rangka mendukung program prioritas Eselon I KKP.

d. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

- Melaksanakan pengawalan pengelolaan anggaran agar tepat

  Penggunaan dan sesuai aturan perundangundangan secara rutin dan berkala. Efisiensi pemantauan secara rutin dan berkala melalui aplikasi dan digitalisasi mempercepat dan mempermudah memperoleh informasi dan hasil pengukuran sehingga pimpinan mendapatkan gambaran kondisi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dan segera memberikan rekomendasi kebijakan bila diperlukan. Aplikasi yang dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja yaitu SMART DJA Bappenas, OM SPAN DJPB Kemenkeu, E-Monev

Bappenas, E- Dalwas KKP, Kinerjaku KKP, E-Pegawai KKP, serta Dashboard dan Weekly Report BPPP Ambon;

- Membayarkan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagai bentuk insentif atas kinerja/kontribusi yang diberikan pada organisasi, dibayarkan berdasarkan capaian kinerja dan progress kerja disamping presensi kehadiran.

e. Penyesuaian

Pelaksanaan revisi indikator, target/volume kinerja dan anggaran dilakukan bila dari hasil reviu diperlukan perubahan, penambahan, dan pergeseran bila diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. BPPP Ambon melakukan beberapa penyesuaian diantaranya melakukan proses identifikasi dan revisi 1) mendukung program prioritas nasional dalam rangka peningkatan produksi budidaya, 2) pergeseran output belanja pegawai untuk kebutuhan penanggulangan Covid-19 di lingkup KKP, 3) belanja perjalanan di internal BPPP Ambon untuk mendukung kegiatan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19 (pelatihan masyarakat).

BAB IV
PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja Utama

Pada akhir tahun 2023, BPPP Ambon memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 25 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key perfomance indikator)*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Ambon sebesar 104,84%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

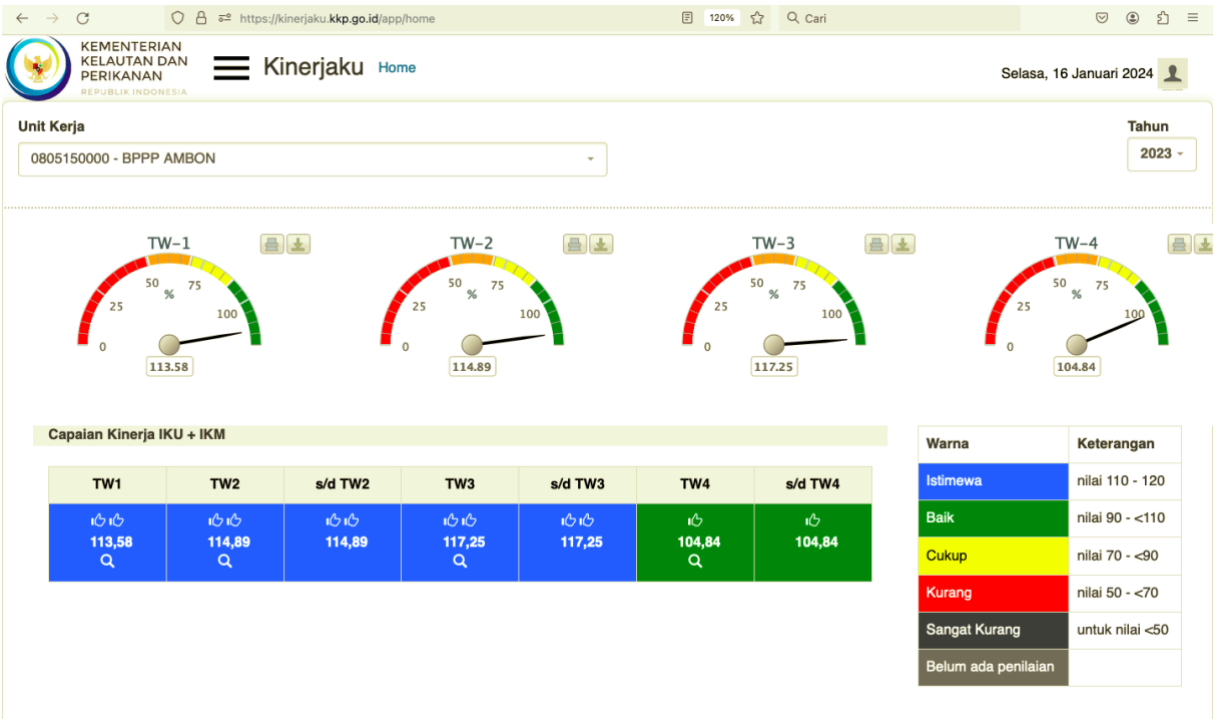

Gambar 18. Dashboard Kinerjaku Level 3 BPPP Ambon

Selama tahun 2023, dari 25 IKU yang menjadi target tahun 2023 BPPP Ambon, ada 1 IKU yang belum memenuhi target dan 24 IKU sisanya semua telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan melebihi target yang telah ditetapkan. Rincian target dan realiasi dari 25 IKU tersebut adalah:

Tabel 58. Capaian IKU BPPP Ambon tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Realisasi
Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	70	72,3	103,29
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	3.414	3.560	104,28
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,570	0,71	120
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	90	90	100
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	16	16	100
		6	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket)	2	2	100
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	2.750	3.015	109,64
		8	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	83	88	106,02
		9	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	190	200	105,26
		10	Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)	348	394	113,22
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	11	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Desa Perikanan Cerdas)	1	1	100
		12	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (Kelompok)	1	5	120
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana	13	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1	1	100

	Pelatihan dan Penyuluhan KP	14	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1	1	100
Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM						
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	15	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100	100	100
		16	Unit Kerja BPPP Ambon yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1	1	100
		17	Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	93	96,61	103,88
		18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%)	92	116,58	120
		19	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	77	85,87	111,52
		20	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5	0	120
		21	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	80	100	120
		22	Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja BPPP Ambon (Inovasi)	1	1	100
		23	Nilai PM SAKIP Lingkup BPPP Ambon (Nilai)	75	82,45	109,93
		24	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)	93,75	92,28	98,43
		25	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	82	82,42	100,51

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi tahun 2022 capaian kinerja tahun 2022, IKU dengan Target Kinerja Tahunan yang diprediksi tidak tercapai target kinerjanya dikarenakan kurang termonitor setiap triwulannya. Maka dari itu Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BPPP Ambon. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Ambon. Akhirnya, BPPP Ambon berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Lilly Aprilya Pregiwati	**Abubakar**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	70
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	2.820
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Milyar)	0,570
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	90
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	16
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket)	2
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	2.750
		8	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	75
		9	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	215
		10	Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)	348
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	11	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Desa Perikanan Cerdas) (Paket)	1
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	12	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1
		13	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	14	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		15	Unit Kerja BPPP Ambon yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		16	Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	92
		17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%)	92
		18	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	77
		19	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA 2022 (%)	≤ 0,5
		20	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	75

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		21	Unit Kerja BPPP Ambon yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)	1
		22	Nilai PM SAKIP Lingkup BPPP Ambon (Nilai)	75
		23	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)	89
		24	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	81

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan dan Penyuluhan KP	10.839.824.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP	48.477.391.000
Total Anggaran BPPP Ambon		**59.317.215.000**

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Lilly Aprilya Pregiwati	**Abubakar**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Juni 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Lilly Aprilya Pregiwati	**Abubakar**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	70
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	3.204
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,570
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	90
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	16
		6	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket)	2
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	2.750
		8	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	75
		9	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	215
		10	Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)	348
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	11	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Desa Perikanan Cerdas)	1
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	12	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1
		13	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	14	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		15	Unit Kerja BPPP Ambon yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		16	Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	92
		17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%)	92
		18	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	77
		19	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA 2022 (%)	≤ 0,5
		20	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	75

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		21	Unit kerja Unit Kerja BPPP Ambon yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)	1
		22	Nilai PM SAKIP Lingkup BPPP Ambon (Nilai)	75.0
		23	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)	89
		24	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan dan Penyuluhan KP	11.139.968.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM	51.993.639.000
Total Anggaran BPPP Ambon		**63.133.607.000**

Jakarta, 21 Juni 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Lilly Aprilya Pregiwati	**Abubakar**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Desember 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Lilly Aprilya Pregiwati	**Abubakar**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%)	70
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	3.414
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,570
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	90
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon (Orang)	16
		6	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Ambon (Paket)	2
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	2.750
		8	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	83
		9	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	190
		10	Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Ambon (Orang)	348
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	11	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Ambon (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	1
		12	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (Kelompok)	1
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	13	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1
		14	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon (Unit)	1
Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM				
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	15	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		16	Unit Kerja BPPP Ambon yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		17	Nilai Rekonsilasi Kinerja BPPP Ambon (Nilai)	93
		18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Ambon (%)	92
		19	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	77
		20	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon (%)	≤ 0,5
		21	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	80
		22	Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja BPPP Ambon (Inovasi)	1
		23	Nilai PM SAKIP Lingkup BPPP Ambon (Nilai)	75.0
		24	Nilai Kinerja Pelaksanaan Angaran BPPP Ambon (nilai)	93,75
		25	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	82

Data Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan dan Penyuluhan KP	12.094.753.000
2	Dukungan Manajemen Internal	51.993.639.000
Total Anggaran BPPP Ambon		**64.088.392.000**

Jakarta, 04 Desember 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Lilly Aprilya Pregiwati	**Abubakar**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
JALAN MARTHA ALFONS, POKA KODE POS 97233 TELUK AMBON
TELEPON (0911) 322710, FAKSIMILE (0911) 322711
Website : bp3ambon-kkp.org
Email : BPPP_ambon@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : ST.20/BPPP /OT.210/I/2023

TENTANG

PERSONIL PENGUMPUL DATA KINERJA
PADA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) AMBON
TAHUN 2023

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2023 dipandang perlu menunjuk Personil Pengumpul Data Kinerja Tahun 2023.
2. Bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Tugas ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Personil Pengumpul Data Kinerja pada BPPP Ambon.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/A1/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/LL/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 87/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

Memberi Tugas

Kepada : Mereka yang nama-nama dan jabatannya tersebut pada amar pertama, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala BPPP Ambon.

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Tim Pengumpul Data Kinerja Tahun 2023 pada BPPP Ambon

Ambon, 2 Januari 2023

Kepala Balai,

Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19780427 200312 1 001

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
   UP. – DIRJEN Anggaran di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
4. Sekretaris Badan Riset SDM-KP di Jakarta.
5. Kapus Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Jakarta
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
7. Kepala Kantor Wilayah XXIX Dirjen Anggaran Ambon di Ambon.
8. KPPN Ambon di Ambon.

Lampiran Surat Tugas
Nomor : ST.20/BPPP /OT.210/I/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

NAMA-NAMA PERSONIL PENGUMPUL DATA KINERJA
PADA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) AMBONTAHUN 2023

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Ket
1.	Abubakar, S.St.Pi, M.Si	19780427 200312 1 001	Penanggung Jawab	- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan - Memberikan arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan	2 Januari – 31 Desember 2023	
2.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004	Ketua (Sub koordinator Kelompok Programdan Monev)	- Bertanggung jawab atas data kinerja yang dikumpulkan	2 Januari – 31 Desember 2023	
3.	Moh Arief Hidayat, A.Md, S.Pi	19870216 201012 1 002	Anggota	- Mengumpulkan dan merekap data kinerja pada sub koordinator program dan monev yang trekait dengan data dukung capaian indikator kinerja : a. Presentase lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon b. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Ambon c. Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon d. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon e. Nilai PM SAKIPLingkup BPPP Ambon f. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPPAmbon g. Nilai Kinerja Anggaran BPPPAmbon h. Data yang dikumpulkan paling lambat tanggal 2 setiap Bulan	2 Januari – 31 Desember 2023	

4.	Rachel L. Wattimena, S.Pi, M.Si	19730531 200604 1 005	Anggota	Mengumpulkan dan merekap data kinerja pada Subbagian Tata Usaha yang trekait dengan data dukung capaian indikator kinerja : - Nilai PNBP SatkerBPPP Ambon - Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KPyang terstandar di BPPP Ambon - Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Ambon - Presentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon - Unit kerja BPPP Ambon yang lolos penilian WBK, TimPenilai Internal KKP - Indeks profesionalitas ASN lingkup BPPP Ambon - Batas tertinggi presentas nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPPP Ambon TA.2021 - Unit kerja BPPP Ambon yang menerapkan Inovasi PelayananPublik - Data yang dikumpulkan paling lambat tanggal 2 setiap Bulan		
5.	Johanna L. Thenu, S.Pi, M.P	19770415 200502 2 001	Anggota	- Mengumpulkan dan merekap data kinerja pada subkoordinator Pelatihan yang trekait dengan data dukung capaian indikator kinerja : a. Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang dilatih di BPPP Ambon b. Jumlah SDM KP yangBersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon c. Lulusan pelatihan yangmembentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Ambon d. Tersedianya materi pelatihan berbasis kaji widya di BPPP Ambon e. Data yang dikumpulkan paling lambat tanggal 2 setiap bulan.	2 Januari – 31 Desember 2023	
6.	Arianto Doha	19790616 200701 1 003	Anggota	- Mengumpulkan dan merekap data kinerja pada subkoordinator Penyuluhan yang terkait dengan data dukung capaian indikator kinerja : - Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal di BPPPAmbon - Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya diSatminkal BPPP Ambon - Kelompok Kelautan dan Perikanan yang	2 Januari – 31 Desember 2023	

				dibentuk di SatminkalBPPP Ambon - Tenaga kerja yangterlibat satker BPPPAmbon - Desa /kawasan mitra yang menerapkan IPTEK KP di BPPP Ambon (Desa Perikanan Cerdas) - Data yang dikumpulkanpaling lambat tanggal 2 setiap bulan.		

Kepala Balai,

Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19780427 200312 1 001

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
Jalan Martha Alfons, Poka, Kode Pos 97233 Teluk Ambon Baguala
Telepon (0911) 322710, Faksimile (0911) 322711
Website : www.bp3ambon-kkp.org
Email : BPPP_ambon@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : ST. 18/BPPP.AMB/OT.210/I/2023

TENTANG

TIM TATA KELOLA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2023 PADA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2023 dipandang perlu menunjuk Tim Tata Kelola SAKIP di BPPPAmbon.
2. Bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Tugas ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Tata Kelola SAKIP pada BPPP Ambon.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan REformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan atta cara review atas laporan kinerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan kerja dan Anggaran Kementerian negara/lembaga.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 87/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

Memberi Tugas

Kepada : Kepada mereka yang nama-nama dan jabatannya tersebut pada amar pertama, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala BPPP Ambon.

Untuk **:** Melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan SAKIP 2023

Ambon, 02 Januari 2023

Kepala Balai,

Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19780427 200312 1 001

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
   UP. – DIRJEN Anggaran di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
4. Sekretaris Badan Riset SDM-KP di Jakarta.
5. Kapus Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Jakarta
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
7. Kepala Kantor Wilayah XXIX Dirjen Anggaran Ambon di Ambon.
8. KPPN Ambon di Ambon.

Lampiran Surat Tugas
Nomor : ST.18/BPPP.AMB/OT.210/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

TIM TATA KELOLA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2023

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Ket
1.	Abubakar, S.St.Pi, M.Si	19780427 200312 1 001	Penanggung Jawab	Sebagai Tim Tata Kelola SAKIP Tahun 2023 pada BPPP Ambon	2 Januari – 31 Desember 2023	
2.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004	Ketua	Sebagai Tim Tata Kelola SAKIP Tahun 2023 pada BPPP Ambon	2 Januari – 31 Desember 2023	
3.	Moh. Arief Hidayat, A.Md, S.Pi	19870216 201012 1 002	Sekretaris	Sebagai Tim Tata Kelola SAKIP Tahun 2023 pada BPPP Ambon	2 Januari – 31 Desember 2023	
4.	Fiona A.B. Nikyuluw, S.Pi,M.Si	19750205 200212 1 002	Anggota	Sebagai Tim Tata Kelola SAKIP Tahun 2023 pada BPPP Ambon	2 Januari – 31 Desember 2023	
5.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005	Anggota	Sebagai Tim Tata Kelola SAKIP Tahun 2023 pada BPPP Ambon	2 Januari – 31 Desember 2023	
6.	Wahyu Retno Aris, S.St.Pi	19890530 201503 1 001	Anggota	Sebagai Tim Tata Kelola SAKIP Tahun 2023 pada BPPP Ambon	2 Januari – 31 Desember 2023	

Kepala Balai

Abubakar, S.St.Pi,
M.Si NIP. 19780427